



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kasatpol PP Tak Tahu Dugaan Belanja Fiktif

Inspektorat: KN Telah Kembali Rp 42,47 Juta

BENGKULU – Kasatpol PP Kota Bengkulu, Mitrul Ajemi S.Sos mengaku tidak mengetahui adanya dugaan belanja fiktif pada kegiatan pengamanan Pemilu 17 April lalu. Dia tengah mencari informasi terkait temuan yang sedang diperiksa oleh Inspektorat dan Kejari Bengkulu. Jika memang ada tindak pidana sebagaimana yang dimaksud, katanya, sudah seharusnya pihak terkait mengembalikan temuan tersebut ke kas daerah.

Mitrul juga menegaskan dalam pengamanan penyelenggaraan pemilu lalu, tidak ada alokasi honor bagi Satpol PP, hanya ada uang makan dan minum. "Ya jelas saya belum tahu pasti masalah ini. Untuk itu saya akan berkoordinasi dengan Inspektorat, juga akan melaksanakan rapat internal membahas

pemasalahan ini," ujar Mitrul kepada **RB**, kemarin (15/10).

Sementara Plt. Inspektur Inspektorat Kota Bengkulu, Sahudin, AK, MSi, CA menjelaskan pihaknya sudah melakukan audit di Satpol PP dan memang ada temuan. Temuan tersebut memang kurang sesuai namun langsung dikembalikan ke kasda oleh Satpol PP. Dari laporan yang ia terima, Satpol PP sudah melakukan pengembalian Rp 42.477.717 yang merupakan kerugian negara hasil identifikasi sementara.

Tentunya setelah pengembalian tersebut pihaknya masih melakukan tindak lanjut pemeriksaan mengingat audit kerugian negara masih bersifat sementara. "Sudah dikembalikan semuanya, itu masih KN sementara yang kita audit. Namun untuk proses hukum kewenangan aparat penegak hukum. Sekalipun demikian kami akan tetap koordinasi dan konsultasi dengan Satpol PP," jelasnya.

Terpisah, Kajari Bengkulu, Emil-

wan Ridwan, SH, MH belum mau berkomentar banyak terkait pemeriksaan kasus tersebut. Namun ia mengakui pemeriksaan akan tetap berjalan dengan pemanggilan beberapa saksi. "Nanti lihat aja deh, pastinya nanti pemanggilan selanjutnya, tunggu saja," pungkasnya.

Dari sumber **RB** di Kejari didapati informasi bahwa pengusutan kasus di Satpol PP Kota itu yang semula masih tahap pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) telah dinaikkan ke tahap penyelidikan (lid). Artinya kasus ini semula ditangani seksi intelijen, telah diserahkan ke seksi pidana khusus (pidsus) Kejari Bengkulu. Jaksa akan kembali melakukan pemanggilan dan pemeriksaan sejumlah saksi dari Satpol PP Kota yang juga diminta membawa dokumen yang berkaitan dengan anggaran Kegiatan Trantibum pada Satpol PP Tahun 2017 hingga Tahun Anggaran 2019.

Informasinya pemeriksaan saksi akan dilaksanakan lagi pada Rabu (16/10). Ada tujuh saksi dan disusul Kamis (17/10) sebanyak tujuh saksi. Sebelumnya Kejari telah melakukan klarifikasi ke tiga pejabat di Satpol PP Kota. Yakni Martinah merupakan Kabid Trantibum, Ujang Jauhari Kasi Ketentraman Masyarakat dan Kasi Ops Satpol PP, Asmilaidi. Dua lainnya, staf di Satpol PP Wono dan Fatima selaku bendahara.

Sebagaimana diketahui, dalam data jumlah Draft Perencanaan Anggaran (DPA) Satpol PP terdapat dana Rp 9.513.218.222. Anggaran tersebut dibagi menjadi belanja tidak langsung sebesar Rp 4.338.470.000 dan belanja langsung sebesar Rp 5.174.748.222. Dari total dana tersebut, sekitar Rp 3,5 miliar dialokasikan untuk belanja penyediaan jasa pendukung administrasi/keamanan/teknis perkantoran dengan target 195 orang. **(cup)**